



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKjIP)
2024**

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2025**

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

**INSPEKTUR
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,**
HENDRA ASWARA, S.STP,MM.CGCAE
Pembina TKI NIP 19810926 199912 1 001

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2024 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak *pandemic* COVID-19. Sumber Daya yang dimiliki Pemerintah Daerah difokuskan untuk menjamin ketersediaan dukungan bidang Kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19. Meskipun demikian BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja yang telah diperjanjikan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Parit Malintang, 14 Januari 2025
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH



TASLIM LETER, SE, Ak
NIP. 19740715 200212 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi	2
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
1.2.2 Anggaran	5
1.3 Dasar Hukum	5
1.4 Sistematika Laporan Kinerja	6
BAB II	8
PERENCANAAN KINERJA	8
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	8
2.2 Rencana Kinerja Tahun n	10
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	10
BAB III	18
AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1 Pengukuran Kinerja	18
3.2 pencapaian indikator kinerja utama	20
3.3 Realisasi Anggaran	76
BAB IV	88
PENUTUP	88
LAMPIRAN	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun n-1 dan Tahun n	5
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis	8
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun n	9
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun n	10
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun n Perangkat Daerah	10
Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun n	12
Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja	20
Tabel 3.2 target dan realisasi tahun 2024	22
Tabel 3.3 program dan kegiatan sasaran 1	22
Tabel 3.4 Indikator dan capaian kinerja dari sasaran 1.....	23
Tabel 3.5 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dan tahun lal.....	27
Tabel 3.6 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.....	27
Tabel 3.7 Perkembangan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Periode 2009 s/d 2024.....	28
Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	32
Tabel 3.9 Analisis Keberhasilan dan Solusi.....	43
Tabel 3.10 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan danSasaran.....	20
Tabel 3.11 program dan kegiatan sasaran 2	45
Tabel 3.12 Indikator dan capaian kinerja dari sasaran 2.....	46
Tabel 3.13 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dan tahun lalu	47

Tabel 3.14 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.....	48
Tabel 3.15 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	49
Tabel 3.16 Analisis Keberhasilan dan Solusi.....	52
Tabel 3.17 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran.....	52
Tabel 3.18 program dan kegiatan sasaran 3	54
Tabel 3.19 Indikator dan capaian kinerja dari sasaran 3.....	56
Tabel 3.20 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dan tahun lalu	57
Tabel 3.21 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.....	57
Tabel 3.22 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	59
Tabel 3.23 Analisis Keberhasilan dan Solusi.....	67
Tabel 3.24 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran.....	67
Tabel 3.25 program dan kegiatan sasaran 4	69
Tabel 3.26 Indikator dan capaian kinerja dari sasaran 4.....	69
Tabel 3.27 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dan tahun lalu	70
Tabel 3.28 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.....	71
Tabel 3.29 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	72
Tabel 3.30 Analisis Keberhasilan dan Solusi.....	75

Tabel 3.31 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran.....76

Tabel 3.32 capaian anggaran program dan kegiatan.....77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi	4
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKJIP BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi

kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH :

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabuapten Padang Pariaman, BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH mempunyai tugas :

“ Membantu Bupati Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan dan Tugas Pembantuan yang Diberikan Kepada Daerah “

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH mempunyai fungsi :

1. Penyusunan perencanaan bidang keuangan;
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan;
3. Penyelenggara Urusan pemerintahan dan Pelayanan Umum dibidang Pendapatan Pengelola Keuangan Daerah;
4. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang Pendapatan,Pengelola Keuangan Daerah;
5. Pelaksanaan tugas lainya yang diberikan oleh pimpinan.

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari :

- a. Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Keuangan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :
- c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan kebijakan strategis badan;
- d. perumusan kebijakan umum bidang Keuangan;
- e. pengendalian pelaksanaan urusan Keuangan dalam rangka mencapai target kinerja badan;
- f. pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- g. pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
- h. pembinaan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Badan;
- i. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, administrasi keuangan dan aset;
- j. koordinasi dan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan/ atau
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH. Berikut bagan struktur organisasi BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH,

```

graph TD
    KB[Kepala Badan  
Taslim Leter, SE, Ak] --> Sek[SEKRETARIS  
ARDISON, SE]
    KB --> SB[SUB BAGIAN UMUM &  
KEPEGAWAIAN  
MARZANI, Amd]
    KB --> KJF[Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan  
Surya Anggraini, SE]
    KB --> KJFSP[Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Keuangan Daerah  
Fitrawati]
    KB --> B1[BIDANG  
PENDATAAN & PENETAPAN  
YONDRI LOEIS, ST, M.Si]
    KB --> B2[BIDANG  
PENAGIHAN  
WASNITA, S.Sos, MM]
    KB --> B3[BIDANG  
ANGGARAN  
RONI ABDILLAH, SE, M.I Kom]
    KB --> B4[BIDANG  
ASET  
RINI ANGGRAINI, SE, Ak]
    KB --> B5[BIDANG  
PERBENDAHARAAN  
HERMAN, SE]
    KB --> B6[BIDANG  
AKUNTANSI  
M. NASIR, SE, AK, M.Si]
    B1 --> SB1[SUB BIDANG  
PENDATAAN  
NOVRI MARTA DINATA,  
S-STP]
    B1 --> KJF1[Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penetapan  
Rivandi Arifin, S.Sos]
    B1 --> SB2[SUB BIDANG  
MONEV & PELAPORAN  
PENDAPATAN  
VIVIAN RUBIANTI, SE]
    B2 --> SB3[SUB BIDANG  
PAJAK DAERAH  
PURNA IRWAN, ST]
    B2 --> SB4[SUB BIDANG  
PENAGIHAN PBB & BPHTB  
BUDI SAPUTRO, S.Pd]
    B2 --> KJF2[Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi  
]
    B3 --> SB5[SUB BIDANG  
PERENCANAAN  
ANGGARAN  
FAJIR MUHAMMAD  
SAWKY S STP, M Si]
    B3 --> SB6[SUB BIDANG  
PENGENDALIAN  
ANGGARAN  
BOY ERYANTOS, SE]
    B3 --> KJF3[Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi SKPD  
EVI NOVIA, SE]
    B4 --> SB7[SUB BIDANG  
ADMINISTRASI ASET  
DELFI, SE]
    B4 --> SB8[SUB BIDANG  
MUTASI ASET  
KISWATI HUSNA, SKM]
    B4 --> KJF4[Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Mutasi Aset  
]
    B5 --> SB9[SUB BIDANG  
PENGELOLAAN KAS DAERAH  
HENI EMALIA YULISTIANA,  
SE, M.Si]
    B5 --> KJF5[Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Belanja Langsung  
YURI SANDRITA, SE]
    B5 --> SB10[SUB BIDANG  
BELANJA TIDAK  
LANGSUNG  
]
    B6 --> SB11[SUB BIDANG  
AKUNTANSI PENDAPATAN &  
BELANJA  
HERLINA TRICIA, SE]
    B6 --> SB12[SUB BIDANG  
MONEY &  
PELAPORAN KEUANGAN  
YESSI PERMATASARI, SE, MM]
    B6 --> KJF6[Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Keuangan Daerah  
Fitrawati]

```

1.2.2 Anggaran

Anggaran yang dimiliki oleh BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH pada tahun 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	Tahun 2023	Rp 205.577.697.641
APBD	Tahun 2024	Rp 219.435.489.568

Sumber : DPA Perubahan Tahun 2023 dan 2024

1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;
9. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Tahun 2024 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja.
- 2 Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Misi Bupati Padang Pariaman tahun 2021-2026 untuk Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman terdapat pada Misi ke 5 (lima) yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Bersih, Berkeadilan, Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintah yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan”. Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Laporan Keuangan Daerah	0	0	0	0	0
	Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Pengelolaan BMD	0	0	0	0	0
	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	0	0	0	80,50 (A)	80,70 (A)
	Meningkatkan Pengelolaan PAD	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	5	5.5	6	6.5	7

Sumber : Renstra BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Periode 2021 - 2026

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
			Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Laporan Keuangan Daerah	jumlah	Salah satu upaya yang dilakukan untuk meraih kembali opini WTP atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah dengan Menindaklanjuti Temuan BPK RI	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Laporan Keuangan Daerah	Lembar Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI
Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Pengelolaan BMD	jumlah	Dalam upaya peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) diperlukannya pencatatan BMD yang akurat, pemanfaatan BMD dengan tepat dan pengelolaan BMD yang tertib	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Pengelolaan BMD	Lembar Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI
Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	nilai	Upaya Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dengan sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja agar mencapai predikat nilai terbaik dalam pengelolaan Sakip Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	BPKD
Meningkatkan Pengelolaan PAD	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	persentase	Peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah diperlukannya pendataan dan penetapan objek pajak di wilayah Kabupaten/Kota	realisasi tahun n- realisasi tahun n-1/realisasi n-1	BPKD

Sumber: Indikator Kinerja Utama BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Tahun 2024

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Tahun 2024 :

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1.5.2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel	1.5.6.1	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Laporan Keuangan Daerah	jumlah	0
1.5.2		1.5.4.2	Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Pengelolaan BMD	jumlah	0
1.5.2		1.5.4.3	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	nilai	80,50 (A)
1.5.2		1.5.2.4	Meningkatkan Pengelolaan PAD	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	prosentase	6.5

Sumber : Rencana Kerja BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH tahun 2024

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.5.2.1	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Laporan Keuangan Daerah	0
1.5.2.2	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Pengelolaan BMD	0
1.5.2.3	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	80,50 (A)
1.5.2.4	Meningkatkan Pengelolaan PAD	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	6.5

Sumber : Perjanjian Kinerja BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH:

**Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH Tahun 2024**

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.5.2.1.1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Perencanaan Anggaran tepat waktu	30 November 2024
1.5.2.1.1		Persentase Pengelolaan Kas Daerah yang Akurat	100 %
1.5.2.1.1		Persentase kualitas laporan keuangan daerah	100 %
1.5.2.1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan APBD Tepat Waktu	4 Dokumen
1.5.2.1.1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	4 Dokumen
1.5.2.1.1.1.2	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	44 OPD
1.5.2.1.1.1.3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	44 OPD
1.5.2.1.1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	4 Dokumen
1.5.2.1.1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen
1.5.2.1.1.2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan perbendaharaan yang terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku	10400 Dokume n
1.5.2.1.1.2.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen
1.5.2.1.1.2.2	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1 Dokumen
1.5.2.1.1.2.3	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen
1.5.2.1.1.2.4	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen
1.5.2.1.1.2.5	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen
1.5.2.1.1.2.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah,	1 Laporan

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	
1.5.2.1.1.2.7	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen
1.5.2.1.1.2.8	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen
1.5.2.1.1.2.9	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2 Dokumen
1.5.2.1.1.2.10	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	205 Orang
1.5.2.1.1.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	6 Dokumen
1.5.2.1.1.3.1	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan
1.5.2.1.1.3.2	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	46 Laporan
1.5.2.1.1.3.3	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang	4 Dokumen

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	APBD Kabupaten/Kota	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
1.5.2.1.1.3.4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	5 Dokumen
1.5.2.1.1.3.5	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2 Dokumen
1.5.2.1.1.3.6	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	547 Orang
1.5.2.1.1.4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen penyaluran keuangan daerah	5 Dokumen
1.5.2.1.1.4.1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan
1.5.2.1.1.4.2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan
1.5.2.1.1.4.3	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan
1.5.2.1.1.5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen dan Data Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	44 Dokumen
1.5.2.1.1.5.1	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	44 Dokumen
1.5.2.2.1	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase BMD yang tercatat dengan akurat	100 %
1.5.2.2.1		Persentase BMD yang Termanfaatkan dengan Tepat	100 %
1.5.2.2.1		Persentase BMD yang Tertib	100 %
1.5.2.2.1.1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang tertib dan tepat waktu	1 Laporan
1.5.2.2.1.1.1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen
1.5.2.2.1.1.2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen
1.5.2.2.1.1.3	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3 Laporan

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.5.2.2.1.1.4	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	4 Laporan
1.5.2.2.1.1.5	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	7 Dokumen
1.5.2.2.1.1.6	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	556 Laporan
1.5.2.2.1.1.7	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1200 Orang
1.5.2.3.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	100 %
1.5.2.3.1		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100 %
1.5.2.3.1		Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	88.50
1.5.2.3.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu	3 Dokumen
1.5.2.3.1.1		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	2 Laporan
1.5.2.3.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
1.5.2.3.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 Laporan
1.5.2.3.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan	2 Laporan
1.5.2.3.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan
1.5.2.3.1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
1.5.2.3.1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat	39 Orang
1.5.2.3.1.5		Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala	39 Orang
1.5.2.3.1.5		Jumlah SKP ASN	39 Orang

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.5.2.3.1.5		Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP	39 Orang
1.5.2.3.1.5.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	80 Paket
1.5.2.3.1.5.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	41 Orang
1.5.2.3.1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan	3 Dokumen
1.5.2.3.1.6		Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	3 Dokumen
1.5.2.3.1.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
1.5.2.3.1.6.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
1.5.2.3.1.6.3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan
1.5.2.3.1.6.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
1.5.2.3.1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan nilai aset	20 Unit
1.5.2.3.1.7.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit
1.5.2.3.1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia	2 Dokumen
1.5.2.3.1.8		Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan	2 Dokumen
1.5.2.3.1.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
1.5.2.3.1.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
1.5.2.3.1.8.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
1.5.2.3.1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah objek aset yang terkelola	10 Unit
1.5.2.3.1.9		Jumlah total nilai aset	20 Unit

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.5.2.3.1.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit
1.5.2.3.1.9.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
1.5.2.3.1.9.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit
1.5.2.4.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Ketersediaan Data Objek dan Subjek PAD	95 %
1.5.2.4.1		Persentase Pencapaian Target PAD	100 %
1.5.2.4.1.1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen ketersediaan data objek dan subjek pajak	1 Dokumen
1.5.2.4.1.1		Jumlah Dokumen Penerimaan Pajak Daerah	1 Dokumen
1.5.2.4.1.1.1	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen
1.5.2.4.1.1.2	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	33 Laporan
1.5.2.4.1.1.3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Unit
1.5.2.4.1.1.4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan
1.5.2.4.1.1.5	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	8 Objek Pajak
1.5.2.4.1.1.6	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	3 Dokumen
1.5.2.4.1.1.7	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen
1.5.2.4.1.1.8	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	7 Dokumen
1.5.2.4.1.1.9	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	7 Dokumen

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *out put* dan *out come* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun rumus pengukuran kinerja tersebut sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{kinerja}}{\text{target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{target} - (\text{realisasi} - \text{target})}{\text{target}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi target penilaian yang lebih tinggi dari dua acuan antara **Keputusan Kepala LAN dan Peraturan Mendagri** dimaksud dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.2 PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Hasil pengukuran kinerja dievaluasi dan dianalisis pencapaian kinerja guna

memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya target yang ditetapkan.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan menghitung efisiensi anggaran dan efisiensi kinerja. Efisiensi anggaran adalah selisih persentase realisasi anggaran ketika kinerja tercapai 100% atau lebih. Efisiensi kinerja adalah selisih antara capaian kinerja dengan capaian 100% target kinerja. Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan jumlah dari efisiensi anggaran dan efisiensi kinerja.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

REVIU BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
30/6-25	24	30/6-25	A	30/6-25	M

Tabel 3.2

Target dan Realisasi Tahun 2024

N o	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Interpretasi
1.	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Temuan	0	0	100	Berhasil
2.	Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Pengelolaan BMD	Jumlah Temuan	0	0	100	Berhasil
3.	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Nilai	A (80.50)	A(80.40)	99,87	Berhasil
4.	Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase	6,5%	99,28%	1.527,3	Sangat Berhasil

Paraf Verifikasi

Ka. Bapelitbangda

Inspektur

Kabag Organisasi



Sasaran 1

Meningkatkan Kualitas Pengelola Keuangan Daerah

Sasaran 1 (satu) ini merupakan salah satu upaya mewujudkan tujuan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman yang terletak pada Misi V, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Bersih, Berkeadilan, Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintah yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan. Selanjutnya tujuan tersebut dicapai dengan salah satu sasaran pada RPJMD dan merupakan tujuan Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun 2021-2026, yaitu: Birograsi Yang Bersih Dan Akuntabel dengan indikator sasaran yaitu Opini WTP Atas Laporan Keuangan Daerah. Adapun formulasi untuk mengukur capaian realisasi indikator kinerja utama yakni :

Formulasi pengukuran : Hasil pemeriksaan BPK RI terhadap LKPD

Sasaran ini didukung dengan beberapa program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Program dan Kegiatan Sasaran 1

No	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	100%
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	100%
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	100%
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	100%
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	100%
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	100%
		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	100%
		Penatausahaan Pembiayaan Daerah	100%
		Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100%
		Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	100%
		Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	100%
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	100%
		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran	100%

No	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja
		Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100%
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	100%
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100%
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	100%
		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	100%
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	100%
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	100%
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	100%
		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	100%
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100%
		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	100%

a) Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2024

Tabel 3.4
Indikator dan capaian kinerja dari sasaran 1

Indikator Kinerja	Capaian 2024			interpretasi
	Target	Realisasi	%	
Persentase Temuan BPK yang Material terhadap Laporan Keuangan	0	0	100	Sangat berhasil

Sebagaimana terlihat pada tabel 3.4 tentang pengukuran capaian sasaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun 2024 capaian sasaran

kinerja sangat berhasil dengan tidak adanya temuan BPK yang material terhadap laporan keuangan daerah yang dibuktikan dengan diperolehnya Opini WTP oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman atas LKPD tahun anggaran 2023.

Adapun kriteria yang dijadikan perhatian BPK dalam memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah sebagai berikut :

1. Laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim yang berlaku di Indonesia (SAP).
2. Kecukupan Pengungkapan.
3. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
4. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping keempat kriteria utama tersebut LKPD yang disajikan harus didukung dengan bukti-bukti audit yang mencukupi, tidak terdapat ketidakpastian dan kesalahan yang cukup berarti (*no material uncertainties*), pengelolaan atas *cash flow* dikontrol dengan baik, dan pengelolaan atas aset daerah dilengkapi dengan bukti-bukti administrasi yang lengkap. Artinya, laporan keuangan yang disajikan telah bebas dari kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang sifatnya material.

Terkait dengan penilaian opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 sudah mengatur tentang jenis opini yang diberikan sebagai salah satu bentuk hasil audit atas laporan keuangan Daerah yang terdiri atas :

1. Wajar Tanpa Pengecualian / WTP (*Unqualified Opinion*)
2. Wajar dengan Pengecualian / WDP (*Qualified Opinion*)
3. Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)
4. Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer Opinion*)

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan hasil penilaian kerja setiap pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan yang diamanatkan kepadanya, tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk menjelaskan informasi yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan pencerminan hasil aktivitas tertentu.

Opini LKPD ini menjadi ukuran penting dari akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Perkembangan yang baik terhadap opini LKPD ini dari tahun ke tahun menjadi penting dari kondusifnya pemerintahan daerah yang sedang berlangsung. Tindak lanjut rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah bisa saja berbeda antar entitas pemerintah daerah yang satu dengan entitas pemerintah daerah lainnya, tergantung kualitas SDM, keterbatasan sarana dan prasarana, luasan wilayah, serta kompleksitas permasalahan yang ada di daerah.

Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dalam urusan penunjang dibidang keuangan telah melakukan berbagai strategi dalam pengelolaan keuangan daerah, Sehingga pada tahun 2024 Kabupaten Padang Pariaman melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai perangkat daerah penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023. Opini ini tertuang dalam LHP BPK RI Nomor 987/S-HP/XVIII.PDG/05/2024 tentang Hasil Pemeriksaaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 pada tanggal 17 Mei 2024. Sedangkan untuk kinerja tahun anggaran 2024 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Padang Pariaman masih dalam proses pemeriksaan oleh Badan Pemerikas Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

b) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2023 dan Tahun 2024

Pada table berikut bisa dilihat capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun 2022, 2023 dan tahun 2024 berhasil direalisasikan setiap tahunnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Opini WTP yang menjadi salah satu tujuan jangka menengah ataupun jangka pendek/tahunan diraih dengan mengupayakan beberapa strategi dan inovasi yang mendukung tercapinya program dan kegiatan.

Tabel 3.5
Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dan tahun lalu;

NO	INDIKATOR	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Laporan Keuangan	0	0	0	0	0	0

c). Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2024 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.6
Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target						Realisasi						%	Interpretasi
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Temuan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			66,6	Berhasil

Perkembangan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Kabupaten Padang Pariaman bisa dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3.7
Perkembangan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Periode 2009 s/d 2024

NO	LKPD TAHUN	OPINI
1.	2009	WDP
2.	2010	WDP
3.	2011	WDP
4.	2012	WDP
5.	2013	WTP
6.	2014	WTP
7.	2015	WTP
8.	2016	WTP
9.	2017	WTP
10.	2018	WDP
11.	2019	WTP
12.	2020	WTP
13.	2021	WTP
14.	2022	WTP
15.	2023	WTP
16.	2024	WTP***

Salah satu upaya yang dilakukan untuk meraih kembali opini WTP atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut :

1. Menindaklanjuti Temuan BPK RI

Dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan temuan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun sebelumnya semua pihak terkait bersama-sama berperan aktif dalam menyelesaikan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi pemeriksaan BPK tahun-tahun sebelumnya. Terkait tindak

lanjut atas rekomendasi temuan BPK RI atas Laporan keuangan daerah Kabupaten Padang Pariaman telah dilakukan pemetaan terhadap Temuan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Periode 2006 s.d 2023. Status tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat berupa telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, dalam proses (belum selesai tindak lanjutnya), belum ditindaklanjuti dan tidak dapat ditindaklanjuti

2. Peningkatan Peran APIP

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) diperkuatnya peran pengawasan internal pemerintah. Pengawasan yang merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintah, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik sehingga dapat mengoptimalkan perannya dalam menjaga keandalan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. APIP juga melakukan review sejak perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan keuangan, hingga pendampingan pada saat pemeriksaan oleh BPK.

Kemudian dalam rangka pengawasan internal, inspektorat Kabupaten Padang Pariaman tidak hanya terbatas pada terbatas pada kegiatan pemngawasan/audit tapi juga melakukan fungsi pembinaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (PERANGKAT DAERAH). Disamping itu Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah berupaya :

1. Meningkatkan level SPIP.
2. Meningkatkan Kapabilitas APIP.
3. Meningkatkan Anggaran APIP sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Meningkatkan kualitas SDM Pengelola Keuangan Daerah

Untuk mencapai suatu tata kelola keuangan daerah yang handal dan profesional juga dilakukan pengembangan kapasitas sumber daya manusia secara berkesinambungan berupa dilaksanakannya pendidikan dan pelatihan maupun bimbingan

teknis terhadap aparatur pengelola keuangan, sehingga memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugasnya.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Dalam Memanfaatkan Teknologi Informasi maka hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Padang Pariaman adalah menggunakan aplikasi SIPD, membangun simda *online* yang terkoneksi dengan semua organisasi perangkat daerah di lingkungan internal Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Selain kedepan aplikasi simda ini akan terintegrasi antara pengelolaan keuangan, pendapatan, dan barang daerah serta melaksanakan SP2D *Online* dengan Bank Nagari.

5. Koordinasi yang baik antara unit terkait baik internal maupun eksternal

Upaya yang tidak kalah penting dalam rangka meraih kembali opini WTP atas laporan keuangan daerah kabupaten Padang Pariaman adalah meningkatkan sinergi, koordinasi, dan komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan. "Ini sangat perlu dilaksanakan untuk keselarasan dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, sehingga menjadi komitmen dari semua pihak dalam rangka memperoleh kembali opini WTP.

6. Deteksi dini potensi permasalahan yang dapat menjadi temuan pemeriksaan

Menghindari potensi temuan tahun berikutnya, maka APIP berperan aktif dalam peningkatan efektifitas sistem pengendalian intern dan pencegahan pelanggaran kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

D) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3.8

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.5.2.1.1	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Laporan Keuangan Daerah	100	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Perencanaan Anggaran tepat waktu	100	Menunjang	Penyusunan Dokumen Perencanaan secara terperinci Penyesuaian penyusunan anggaran dengan regulasi terbaru
1.5.2.1.1					Persentase Pengelolaan Kas Daerah yang Akurat	100	Menunjang	Efisiensi dalam pengelolaan belanja dan Management Kas Ketat
1.5.2.1.1					Persentase kualitas laporan keuangan daerah	100	Menunjang	Percepatan Pemenuhan Kelengkapan Dokumen Penyusunan LKPD oleh seluruh SKPD
1.5.2.1.1.1				Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan APBD Tepat Waktu	100	Menunjang	Percepatan Penyusunan , RKPD, KUA PPAS dan Standar Harga Satuan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.5.2.1.1.1.1				Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	100	Menunjang	penyusunan dokumen KUA PPAS tepat waktu sesuai jadwal tahapan penganggaran
1.5.2.1.1.1.2				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	100	Menunjang	terverifikasinya RKA tepat waktu untuk lanjut kepada tahapan penetapan DPA
1.5.2.1.1.1.3				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	100	Menunjang	penyusunan DPA awal yang terverifikasi tepat waktu
1.5.2.1.1.1.4				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	100	Menunjang	Percepatan Penyusunan Perda dan Pebup APBD
1.5.2.1.1.1.5				Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	100	Menunjang	penyusunan Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran tepat waktu
1.5.2.1.1.2				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan perbendaharaan yang terlaksana	100	Menunjang	perencanaan dan penatausahaan keuangan yang baik dan terlaksana sesuai aturan yang berlaku

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					sesuai dengan ketentuan yang berlaku			
1.5.2.1.1.2.1				Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	100	Menunjang	pengelolaan kas daerah yang terlaksana akurat dan tepat waktu dengan didukung kualitas dan kuantitas SDM pengelolaan perbendaharaan
1.5.2.1.1.2.2				Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	100	Menunjang	Peningkatan perencanaan dalam pengelolaan anggaran kas
1.5.2.1.1.2.3				Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	100	Menunjang	Pelaksanaan penyertaan modal ke Bank Nagari
1.5.2.1.1.2.4				Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi	100	Menunjang	Percepatan Penyusunan Laporan Realisasi Penggunaan Dana ke Pusat

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			
1.5.2.1.1.2.5				Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	100	Menunjang	Peningkatan Kerjasama dengan Bank Nagari
1.5.2.1.1.2.6				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan	100	Menunjang	Rekonsiliasi secara terjadwal dan berkelanjutan terhadap penggunaan dana

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pem otongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pem otongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			
1.5.2.1.1.2.7				Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi	100	Menunjang	Management Kas Ketat

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas			
1.5.2.1.1.2.8				Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	100	Menunjang	Rekonsiliasi berkala dengan PD
1.5.2.1.1.2.9				Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang	100	Menunjang	Sosialisasi terhadap regulasi baru

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			
1.5.2.1.1.2.10				Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100	Menunjang	Peningkatan Kapasitas terhadap Pejabat Pengelola Keuangan
1.5.2.1.1.3				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	100	Menunjang	Percepatan Pemenuhan Kelengkapan Dokumen Penyusunan LKPD oleh seluruh SKPD
1.5.2.1.1.3.1				Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan	100	Menunjang	Percepatan pengusulan jadwal pembahasan dengan eksekutif legislatif

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				dan Semesteran	Semesteran			
1.5.2.1.1.3.2				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	100	Menunjang	Rekonsiliasi berkala dengan PD
1.5.2.1.1.3.3				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100	Menunjang	Komitmen Kepala Daerah, Pihak Eksekutif dan Legislatif dalam Menyelesaikan PERDA Pertanggungjawaban

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Kabupaten/Kota			
1.5.2.1.1.3.4				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	100	Menunjang	Peningkatan tindak lanjut LHP
1.5.2.1.1.3.5				Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	100	Menunjang	Update Regulasi terbaru dalam penyusunan kebijakan
1.5.2.1.1.3.6				Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawab	100	Menunjang	pembinaan dan bimtek dalam penyusunan LKPD

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					an Pemerintah Kabupaten/Kota			
1.5.2.1.1.4				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen penyaluran keuangan daerah	100	Menunjang	Peningkatan perencanaan dalam pengelolaan dan penyaluran keuangan
1.5.2.1.1.4.1				Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	100	Menunjang	Peningkatan penatausahaan penyaluran bantuan keuangan
1.5.2.1.1.4.2				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	100	Menunjang	Peningkatan verifikasi penyaluran BTT
1.5.2.1.1.4.3				Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	100	Menunjang	Peningkatan pengelolaan penyaluran DBH
1.5.2.1.1.5				Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup	Jumlah Dokumen dan Data Pelaporan Keuangan Tepat	100	Menunjang	Optimalisasi Pemanfaatan SIPD

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Keuangan Daerah	Waktu			
1.5.2.1.1.5.1				Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	100	Menunjang	Optimalisasi Pemanfaatan SIPD

Sumber : Capaian Kinerja Tahun 2024

E) Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Analisis Keberhasilan dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.5.2.1	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Laporan Keuangan Daerah	0	0	100	1. Menindaklanjuti temuan BPK RI 2. Pemanfaatan dan Implementasi SIPD dengan maksimal 3. Percepatan penyusunan laporan keuangan perangkat daerah dengan melakukan rekon secara intens 4. Komitmen dalam dengan SKPD penyusunan LK tepat waktu 5. Koordinasi dengan perangkat daerah dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (<i>money follow result</i>) dengan melakukan verifikasi RKA 6. Menyusun surat edaran tentang Batasan pencairan dan percepatan penyelesaian pencairan 7. Kerjasama yang baik dengan Bank Nagari	1. Deteksi dini potensi permasalahan yang dapat menjadi temuan pemeriksaan 2. Sosialisasi terkait regulasi terbaru dalam pengelolaan keuangan 8. Peningkatan kualitas SDM pengelola keuangan 3. Perlunya Management Kas Ketat 4. Pengoptimalan implementasi SIPD 5. Peningkatan kesepahaman tujuan antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan APBD

Sumber : Rencana Tindak Lanjut Pengendalian BPKD 2024

F) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.10

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Targ et	Realis asi	% Capai an	Anggaran	Realisasi	%	
					(Rp.)	(Rp.)	Capai an	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.5.2 .1	Meningkat kan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	0	0	100	202.383.877. 818	197.831.513. 529	97,75	4.552.364. 289

Sumber : LRA BPKD Tahun 2024

Dalam sasaran meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah tercapai realisasi Rp. 197.831.513.529 dengan target Rp 202.383.877.818 atau sebesar 97.75%.

Formulasi Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	:	Efisiensi Capaian Kinerja + Efisiensi Penyerapan Anggaran
Efisiensi Capaian Kinerja	:	100% - 100% = 0%
Efisiensi Penyerapan Anggaran	:	100%-97,75% = 2,25%
Total efisiensi	:	0% + 2,25% = 2,25%

Dari formulasi diatas dapat disampaikan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2.25% dengan capaian kinerja berdasarkan hasil opini BPK RI Atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/100%) sesuai dengan yang tertuang dalam LHP BPK RI Nomor 987/S-HP/XVIII.PDG/05/2024 tentang Hasil Pemeriksaaan atas Laporan Keuangan Pemerintah

Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 pada tanggal 17 Mei 2024 dengan pengurangannya adalah persentase capaian realisasi anggaran adalah 97.75%.

	Sasaran 2 <i>Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)</i>
---	--

Sasaran 2 (dua) merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang bersih dan akuntabel. Pengelolaan asset daerah ini menjadi salah satu sasaran yang diprioritaskan Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam mencapai sasaran RPJMD tahun 2021-2026, yaitu Birograsi Yang Bersih Dan Akuntabel dengan indikator sasaran yaitu Opini WTP Atas Laporan Keuangan Daerah.

Formulasi pengukuran : Hasil pemeriksaan BPK RI terhadap LKPD

Sebagai upaya meningkatkan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Padang Pariaman, maka Badan Pengelola Keuangan Daerah didukung dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.11
Program dan kegiatan sasaran 2

No	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja
1.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%
		Penyusunan Standar Harga	100%
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	100%
		Pengamanan Barang Milik Daerah	100%
		Penilaian Barang Milik Daerah	100%
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	100%
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100%
		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100%

a) Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2024

Tabel 3.12
Indikator dan capaian kinerja dari sasaran 2

Indikator Kinerja	Capaian 2024		
	Target	Realisasi	%
Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Pengelolaan BMD	0	0	100%

Sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab BPKD sebagai pembantu pengelola BMD yaitu mengkoordinir pengelolaan BMD yang ada pada masing-masing Perangkat Daerah dan pembantu pengurus barang dalam melaksanakan kewenangannya, maka dalam rangka mendapatkan data aset daerah Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan kondisi riil telah dilaksanakan program pengelolaan barang milik daerah dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan pengelolaan BMD.

Setiap Perangkat Daerah atau unit kerja selaku pengguna barang atau kuasa pengguna barang daerah harus melakukan penatausahaan aset. Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi oleh pengguna barang atau kuasa pengguna barang disusun laporan aset daerah dengan menyajikan informasi terkait aset daerah pada waktu tertentu yaitu laporan semesteran dan laporan tahunan disampaikan kepada Bupati Padang Pariaman melalui Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Laporan barang daerah yang disusun oleh pengguna/kuasa pengguna barang dihimpun oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku pembantu pengelola barang daerah dan menjadi laporan Barang Milik Daerah yang dipergunakan sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah daerah. Wewenang dan tanggungjawab Badan

Pengelola Keuangan Daerah sebagai pembantu pengelola BMD yaitu mengkoordinir pengelolaan BMD yang ada pada masing-masing Perangkat Daerah.

B) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2023 dan Tahun 2024

Tabel 3.13
Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dan tahun lalu;

NO	INDIKATOR	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Pengelolaan BMD	0	0	0	0	0	0

Dari table diatas terlihat perbandingan capaian target kinerja tahun 2022, 2023 dan Tahun 2024 berhasil dengan tidak adanya temuan BPK yang material terhadap pengelolaan BMD. Namun untuk lebih efektifnya pengelolaan BMD masih terdapat beberapa kendala yang membutuhkan penanganan cepat sehingga pengelolaan BMD di Kabupaten Padang Pariaman terinventaris dengan baik dan memberikan manfaat dalam menunjang capaian program dan kegiatan pemerintah daerah.

C) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2024 dengan Target Jangka Menengah

Berikut capaian jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun 2021-2024 seperti table berikut :

Tabel 3.14
Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini
dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen
perencanaan strategis organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target						Realisasi						%	Interpretasi
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Pengelolaan BMD	Jumlah Temuan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			66,6	Berhasil

D) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3.15

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.5.2.2.1	Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Pengelolaan BMD	100	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase BMD yang tercatat dengan akurat	100	Menunjang	Inventarisasi BMD berkala
1.5.2.2.1					Persentase BMD yang Termanfaatkan dengan Tepat	100	Menunjang	Peningkatan monitoring pemanfaatan BMD tepat sasaran
1.5.2.2.1					Persentase BMD yang Tertib	100	Menunjang	Peningkatan Kepatuhan PD dalam menyampaikan Laporan Aset
1.5.2.2.1.1				Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang tertib dan tepat waktu	100	Menunjang	Peningkatan Kepatuhan PD dalam menyampaikan Laporan Aset
1.5.2.2.1.1.1				Penyusunan Standar	Jumlah Standar	100	Menunjang	Percepatan Penyusunan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Harga	Harga yang Disusun			Standar Harga
1.5.2.2.1.1.2				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	100	Menunjang	Percepatan Penyusunan RKBMD dan RKPBMMD
1.5.2.2.1.1.3				Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	100	Menunjang	Inventarisasi BMD
1.5.2.2.1.1.4				Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	100	Menunjang	Penilaian Mandiri dan Meningkatkan SDM Penilai Pemda
1.5.2.2.1.1.5				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan n, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik	100	Menunjang	Peningkatan Rakor dengan PD

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Daerah			
1.5.2.2.1.1.6				Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	100	Menunjang	Pelaksanaan pembinaan dan bimtek dalam penyusunan Laporan BMD
1.5.2.2.1.1.7				Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100	Menunjang	Pelaksanaan pembinaan dan bimtek dalam penyusunan Laporan BMD

Sumber : Capaian Kinerja Tahun 2024

Capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2024 didukung oleh beberapa faktor penunjang keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan. Sehingga indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sudah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan pada Renstra periode 2021-2026.

E) Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.16
Analisis Keberhasilan dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.5.2	Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Pengelolaan BMD	0	0	100	1. Peningkatan Kepatuhan PD dalam menyampaikan Laporan Aset 2. Percepatan Penyusunan RKBMD dan RKPBMMD 3. Inventarisasi BMD berkala 4. Pelaksanaan pembinaan dalam pemberian kodefikasi BMD 5. Melaksanakan rekon aset secara intens dan berkala	1. Meningkatkan Kualitas Rekon Aset 2. Meningkatkan Pemahaman tentang Pentingnya RKBMD dan RKPBMMD 3. Melakukan Penilaian Mandiri dan Meningkatkan SDM Penilai Pemda 4. Peningkatan Rakor dengan Perangkat Daerah

Sumber : Rencana Tindak Lanjut Pengendalian BPKD 2024

F) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.17

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.5.2.	Meningkatkan	0	0	100	1.020.944.8	912.822.1	89,41	108.122.6

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Targ et	Realisa si	% Capaia n	Anggaran	Realisasi	%	
					(Rp.)	(Rp.)	Capaia n	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	an Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)				00	04		96

Sumber : LRA BPKD Tahun 2024

Dalam sasaran meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik daerah tercapai realisasi Rp. 1.020.944.800 dengan target Rp 1.020.944.800 atau sebesar 89.41%

Formulasi Efisiensi	:	Efisiensi Capaian Kinerja + Efisiensi
Penggunaan Sumber Daya	:	Penyerapan Anggaran
Efisiensi Capaian Kinerja	:	100% - 100% = 0%
Efisiensi Penyerapan Anggaran	:	100%-89,41% = 10,59%
Total efisiensi	:	0% + 10,59% = 10,59%

Dari formulasi diatas dapat disampaikan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 10,59% dengan capaian kinerja berdasarkan hasil opini BPK RI Atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/100%) sesuai dengan yang tertuang dalam LHP BPK RI Nomor 987/S-HP/XVIII.PDG/05/2024 tentang Hasil Pemeriksaaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 pada tanggal 17 Mei 2024 dengan pengurangnya adalah persentase capaian realiasasi anggaran adalah 89,41%.

	Sasaran 3 Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
---	--

Sasaran 3 (tiga) Badan Pengelola Keuangan Daerah merupakan upaya dalam peningkatan Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dengan sasarannya adalah nilai Sakip Perangkat Daerah. Dalam hal ini didukung melalui program penunjang urusan pemerintah kabupaten/kota yang berfungsi menunjang semua sasaran yang ada pada BPKD dalam mencapai visi Padang Pariman.

Formulasi pengukuran : Nilai Sakip Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat

Sehubungan dengan besarnya kontribusi program penunjang urusan pemerintah kabupaten/kota ini terhadap jalannya sasaran, program dan kegiatan di BPKD maka untuk mencapai sasaran 3 (tiga) ini perlu didukung melalui kegiatan berikut :

Tabel 3.18
Program dan Kegiatan Sasaran 3

No	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%
		Administrasi keuangan perangkat daerah	100%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%
		Administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100%
	Administrasi umum perangkat daerah	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%

a) Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2024

Tabel 3.19
Indikator dan capaian kinerja dari sasaran 3

Indikator Kinerja	Capaian 2024		
	Target	Realisasi	%
Nilai Sakip Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	A (80,50)	A (80,40)	99,87

Berdasarkan tabel 3.19 diatas, untuk mencapai target yang sudah ditetapkan BPKD didukung berbagai faktor seperti :

1. Ketersediaan dana dan komitmen dalam melaksanakan kegiatan serta pemenuhan dokumen tepat waktu
2. Komitmen dalam pertanggungjawaban PPTK terhadap SPJ kegiatan
3. Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi dan teknis perkantoran
4. Adanya dukungan kualitas sumber daya aparatur
5. Adanya sinergitas dengan seluruh pihak/stackholder terkait
6. Terjalinnnya koordinasi internal dengan baik

Disamping itu juga terdapat beberapa kendala dalam pencapaian sasaran ini diantaranya :

1. Rasionalisasi anggaran yang mempengaruhi nilai PAGU pada masing-masing kegiatan
2. Keterlambatan dalam pembayaran tunjangan dan honor lainnya yang disebabkan oleh ketersediaan dana dan hal lainnya
3. Kurangnya fasilitas dalam melakukan bimtek sekaitan dengan program penunjang urusan pemerintah kabupaten/kota
4. Masih minimnya sarana dan prasarana dalam pencapaian sasaran

Dengan beberapa kendala yang ditemui dalam pencapaian sasaran tersebut namun tidak mengurangi komitmen untuk mencapai target nilai SAKIP BPKD pada tahun 2024

B) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2023 dan Tahun 2024

Perbandingan realisasi capaian IKU pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.20
Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dan tahun lalu;

NO	INDIKATOR	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Nilai Sakip Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	A	A	A	A	A	A

Dapat diketahui bahwa sasaran 3 (tiga) yaitu peningkatan Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan pada BPKD ini sangat berkontribusi besar dalam mencapai sasaran lain yang ada di BPKD diantaranya yaitu dalam meningkatkan Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

C) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2024 dengan Target Jangka Menengah

Berikut capaian tahun 2024 atas sasaran 3 (tiga) dibandingkan dengan capaian jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun 2021-2026 seperti yang terlihat dalam table berikut :

Tabel 3.21
Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target						Realisasi						%	Interpretasi
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Nilai	A	A	A	A	A	A	AA	A	A	A	-	-	66,6	Berhasil

D) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3.22

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.5.2.3.1	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	100	Menunjang	Sinkronisasi dokumen perencanaan
1.5.2.3.1					Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100	Menunjang	Verifikasi Dokumen Keuangan PD Percepatan tindak Lanjut LHP BPK
1.5.2.3.1					Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	100	Menunjang	Meningkatkan Agreement terkait Optimalisasi Kinerja secara Akuntabel
1.5.2.3.1.1				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu	100	Menunjang	Sinkronisasi dokumen perencanaan
1.5.2.3.1.1					Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar	100	Menunjang	Pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan DPA

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					realisasi kinerja perangkat daerah			
1.5.2.3.1.1.1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	Menunjang	Sinkronisasi dokumen perencanaan
1.5.2.3.1.1.2				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	Menunjang	Pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan DPA
1.5.2.3.1.2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan	100	Menunjang	Percepatan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1.5.2.3.1.2.1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	100	Menunjang	Pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu dan sesuai aturan yang

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Tunjangan ASN			berlaku
1.5.2.3.1.2.2				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	Menunjang	Pelaksanaan pembayaran jonor penngelola keuangan tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku
1.5.2.3.1.5				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat	100	Menunjang	Memfasilitasi ASN dalam pengurusan dokumen kepegawaian
1.5.2.3.1.5					Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala	100	Menunjang	Memfasilitasi ASN dalam pengurusan dokumen kepegawaian
1.5.2.3.1.5					Jumlah SKP ASN	100	Menunjang	Memfasilitasi ASN dalam pengurusan dokumen kepegawaian
1.5.2.3.1.5					Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP	100	Menunjang	Memfasilitasi ASN dalam pengurusan dokumen kepegawaian
1.5.2.3.1.5.1				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100	Menunjang	Pelaksanaan pengadaan pakaian dinas ASN

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.5.2.3.1.5.2				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	100	Menunjang	Peningkatan fasilitas bimtek ASN
1.5.2.3.1.6				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan	100	Menunjang	Peningkatan pelayanan administrasi umum
1.5.2.3.1.6					Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	100	Menunjang	Peningkatan pelayanan administrasi umum
1.5.2.3.1.6.1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	100	Menunjang	Peningkatan pelaksanaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kanto
1.5.2.3.1.6.2				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah	100	Menunjang	Peningkatan pelaksanaan Penyediaan Peralatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Tangga yang Disediakan			Rumah Tangga
1.5.2.3.1.6.3				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	Menunjang	Memfasilitasi Kunjungan Tamu
1.5.2.3.1.6.4				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Menunjang	Peningkatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.5.2.3.1.7				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan nilai aset	100	Menunjang	Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemerintah Daerah
1.5.2.3.1.7.1				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100	Menunjang	Pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.5.2.3.1.8				Penyediaan Jasa Penunjang Urutan	Jumlah jasa penunjang urusan	100	Menunjang	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urutan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Pemerintahan Daerah	pemerintah yang tersedia			Pemerintahan Daerah
1.5.2.3.1.8					Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan	100	Menunjang	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.5.2.3.1.8.1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	Menunjang	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.5.2.3.1.8.2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	Menunjang	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.5.2.3.1.8.3				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	Menunjang	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.5.2.3.1.9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah objek aset yang dikelola	100	Menunjang	Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.5.2.3.1.9					Jumlah total nilai aset	100	Menunjang	Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.5.2.3.1.9.1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100	Menunjang	Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.5.2.3.1.9.2				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	Menunjang	Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.5.2.3.1.9.3				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	Menunjang	Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					bilitasi			

E) Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.23

Analisis Keberhasilan dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.5.2.3	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	80.50	80.40	99,87	1. Memaksimalkan pencairan sesuai tingkatan prioritas 2. Sinkronisasi dokumen perencanaan dengan penganggaran dan pelaporan 3. Peningkatan penyusunan anggaran dengan kebutuhan 4. Memfasilitasi ASN dalam pengurusan dokumen kepegawaian	1. Efisiensi dalam pengelolaan belanja 2. Perlunya Adanya Sistem yang Terintegrasi antara Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan 3. Pemenuhan Anggaran untuk Mencukupi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor

Sumber : Rencana Tindak Lanjut Pengendalian BPKD 2024

F) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.24

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Tar get	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
					(Rp.)	(Rp.)	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.5. 2.3	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja	80.5 (A)	80.4 (A)	99,87	12.611.379. 951	11.254.90 8.238	89,24	1.356.471. 713

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Tar get	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
					(Rp.)	(Rp.)	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Pelayanan Perangkat Daerah							

Sumber : LRA BPKD Tahun 2024

Dalam sasaran meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah tercapai realisasi Rp. 11.254.908.238 dengan target Rp 12.611.379.951 atau sebesar 89.24%

Formulasi Efisiensi	:	Efisiensi Capaian Kinerja + Efisiensi
Penggunaan Sumber Daya	:	Penyerapan Anggaran
Efisiensi Capaian Kinerja	:	100% - 100% = 0%
Efisiensi Penyerapan Anggaran	:	100%-89,24% = 10,76%
Total efisiensi	:	0% + 10,76% = 10,76%

Dari formulasi diatas dapat disampaikan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 10,76% dengan capaian kinerja berdasarkan hasil evaluasi sakip yang dilakukan inpektorat, Badan Pengelola Keuangan Daerah mendapat nilai (A) atau dengan nilai 80,40.

	Sasaran 4 Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
---	---

Sasaran 4 (empat) Badan Pengelola Keuangan Derah merupakan upaya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah. Kontribusi sektor pajak dan retribusi sangat diharapkan dalam menambah pendapatan daerah di Kabupaten Padang Pariaman.

Formulasi pengukuran : $\text{realisasi} / \text{target} \times 100\%$

Mengingat besarnya kontribusi pajak dan retribusi terhadap keuangan daerah, maka upaya yang dilakukan Badan Pengelola keuangan Daerah untuk mencapai sasaran 4 (empat) ini perlu didukung dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.25
Program dan kegiatan sasaran 4

No	Program	Kegiatan	Capaian Kinerja
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	100%
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	100%
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	100%
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	100%
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	100%
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	100%
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	100%
		Penagihan Pajak Daerah	100%
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	100%

A) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2023 dan Tahun 2024

Tabel 3.26
Indikator dan capaian kinerja dari sasaran

Indikator Kinerja	Capaian 2024		
	Target	Realisasi	%
Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	6,5%	99,28%	1.527,3

Sebagaimana terlihat pada tabel diatas tentang pengukuran capaian sasaran 4 terdapat peningkatan yang sangat tinggi dari penerimaan pajak dan retribusi daerah di tahun 2024.

Untuk Sasaran Strategis “Meningkatkan Pengelolaan PAD” dengan Indikator Kinerjanya “*Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak*”

dan Retribusi Daerah” dapat dilihat capaian yang sangat tinggi dari target yang ditetapkan, dimana realisasi pada tahun 2024 mencapai 99.28% sedangkan target hanya 6.5%. Peningkatan yang sangat signifikan ini diakibatkan adanya penyesuaian rekening belanja penerimaan retribusi daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dimana Pendapatan BLUD yang sebelumnya termasuk pada Pendapatan Lain-Lain, namun sesuai dengan Undang-Undang diatas harus disesuaikan, dimana pendapatan BLUD tersebut termasuk kedalam penerimaan retribusi dengan rincian belanja nya yaitu “*Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*”. Sehingga mengakibatkan terjadinya peningkatan pada penerimaan PAD pada tahun 2024.

B) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2023 dan Tahun 2024

Dengan berbagai kendala yang dihadapi personil pemungut pajak dan retribusi diatas, namun tidak mengurangi realisasi persentase penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, seperti terlihat pada table berikut:

Tabel 3.27
Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dan tahun lalu;

NO	INDIKATOR	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	5,5	13,05	6	21,56	6,5	99,28

Pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi merupakan salah satu pendapatan yang berkontribusi besar pada

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Padang Pariaman. Berdasarkan tabel diatas terjadi kenaikan pajak dan retribusi daerah yang cukup tinggi, sehingga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah pada APBD Padang Pariaman.

c). Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2024 dengan Target Jangka Menengah

Berikut capaian tahun 2024 bila dibandingkan dengan capaian jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun 2021-2026 dimana terlihat capaian yang cukup tinggi dibanding dengan target yang telah ditetapkan :

Tabel 3.28

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target						Realisasi						%	Interpretasi
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase	5	5,5	6	6,5	7	7,5	5,71	13,05	21,56	99,28	-	-	372,26	Sangat Berhasil

D) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3.29

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.5.2.4.1	Meningkatkan Pengelolaan PAD	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	100	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Ketersediaan Data Objek dan Subjek PAD	100	Menunjang	Pendataan dan Pemutakhiran data pajak daerah
1.5.2.4.1					Persentase Pencapaian Target PAD	100	Menunjang	Peningkatan Pemungutan PAD
1.5.2.4.1.1				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen ketersediaan data objek dan subjek pajak	100	Menunjang	Pendataan dan Pemutakhiran data pajak daerah
1.5.2.4.1.1					Jumlah Dokumen Penerimaan Pajak Daerah	100	Menunjang	Peningkatan Pemungutan PAD
1.5.2.4.1.1.1				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta	100	Menunjang	Penyusunan Perda Perbup Pajak Daerah

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah			
1.5.2.4.1.1.2				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	100	Menunjang	Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
1.5.2.4.1.1.3				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	100	Menunjang	Penggunaan dan pemeliharaan aplikasi pajak daerah
1.5.2.4.1.1.4				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	100	Menunjang	Pendataan dan pemutakhiran pajak daerah
1.5.2.4.1.1.5				Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP	100	Menunjang	Penilaian PBB dan BPHTB

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	nya			
1.5.2.4.1.1.6				Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	100	Menunjang	Penetapan pajak daerah sesuai aturan dan tarif yang berlaku
1.5.2.4.1.1.7				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	100	Menunjang	Penyusunan Laporan realisasi penerimaan pajak daerah
1.5.2.4.1.1.8				Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	100	Menunjang	Optimalisasi penagihan pajak daerah
1.5.2.4.1.1.9				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	100	Menunjang	Pelaksanaan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

E) Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.30
Analisis Keberhasilan dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.5.2.4	Meningkatkan Pengelolaan PAD	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	6.5	99.28	1.527,3	1. Pemutakhiran data pajak 2. Penggalian potensi pajak baru 3. Peningkatan Pemungutan PAD 4. Peningkatan penggunaan aplikasi berbasis online untuk seluruh pajak 5. Peningkatan kualitas pendataan dan penggalian potensi pajak daerah 6. Penggunaan Aplikasi e-PBB dan e-BPHTB	1. Melakukan penillain massal untuk 17 kecamatan 2. Pendataan yang Akurat dan menggali potensi PAD baru 3. Edukasi dan sosiliasi terkait kewajiban perpajakan 4. Peningkatan Database Pajak Secara Online 5. Pendataan piutang pajak jatuh tempo

Sumber : Rencana Tindak Lanjut Pengendalian BPKD 2024

F) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.31

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Targ et	Realisa si	% Capai an	Anggaran	Realisasi	%	
					(Rp.)	(Rp.)	Capai an	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.5.2. 4	Meningkatk an Pengelolaan PAD	6.5	99.28	1.527,3	3.419.287.0 00	2.913.078.4 86	85,20	506.208.5 14

Sumber : LRA BPKD Tahun 2024

Dalam sasaran meningkatkan meningkatkan pengelolaan PAD tercapai realisasi Rp. 2.913.078.486 dengan target Rp 3.419.287.000 atau sebesar 85.20%

Formulasi Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	:	Efisiensi Capaian Kinerja + Efisiensi Penyerapan Anggaran
Efisiensi Capaian Kinerja	:	100% - 100% = 0%
Efisiensi Penyerapan Anggaran	:	100%-85,20% = 14,8%
Total efisiensi	:	0% + 14,8% = 14,8%

Dari formulasi diatas dapat disampaikan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 14,8%.

3.3 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.32 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.5. 2.1. 1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	202.383.877.8 18	197.831.513.529	97,75
1.5. 2.1. 1.1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.456.742.000	1.181.761.543	81,12
1.5. 2.1. 1.1. 1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	7.650.000	5.230.000	68,37
1.5. 2.1. 1.1. 2	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	19.500.000	18.437.500	94,55
1.5. 2.1. 1.1. 3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	3.980.000	2.780.000	69,85
1.5. 2.1. 1.1. 4	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.390.302.000	1.137.202.243	81,80
1.5. 2.1. 1.1. 5	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	35.310.000	18.111.800	51,29
1.5. 2.1. 1.2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	440.960.000	382.586.885	86,76
1.5. 2.1.	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	124.982.000	119.155.616	95,34

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.2. 1				
1.5. 2.1. 1.2. 2	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	6.580.000	5.300.000	80,55
1.5. 2.1. 1.2. 3	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	3.860.000	680.000	17,62
1.5. 2.1. 1.2. 4	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	31.295.000	17.414.900	55,65
1.5. 2.1. 1.2. 5	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	16.600.000	13.269.700	79,94
1.5. 2.1. 1.2. 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	155.297.000	144.696.865	93,17

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.5. 2.1. 1.2. 7	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	5.960.000	2.423.800	40,67
1.5. 2.1. 1.2. 8	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	13.230.000	9.350.088	70,67
1.5. 2.1. 1.2. 9	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2.800.000	0	0,00
1.5. 2.1. 1.2. 10	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	80.356.000	70.295.916	87,48
1.5. 2.1. 1.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	358.778.000	312.574.933	87,12
1.5. 2.1.	Koordinasi Penyusunan Laporan	37.425.000	37.065.300	99,04

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.3. 1	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			
1.5. 2.1. 1.3. 2	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	79.300.000	78.419.725	98,89
1.5. 2.1. 1.3. 3	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	28.980.000	28.713.600	99,08
1.5. 2.1. 1.3. 4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	6.980.000	0	0,00
1.5. 2.1. 1.3. 5	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	23.448.000	22.750.269	97,02
1.5.	Pembinaan Akuntansi,	182.645.000	145.626.039	79,73

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.1. 1.3. 6	Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota			
1.5. 2.1. 1.4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	199.968.145.8 18	195.809.877.980	97,92
1.5. 2.1. 1.4. 1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	181.121.886.5 00	181.097.701.500	99,99
1.5. 2.1. 1.4. 2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	10.000.000.00 0	7.691.341.000	76,91
1.5. 2.1. 1.4. 3	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	8.846.259.318	7.020.835.480	79,37
1.5. 2.1. 1.5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	159.252.000	144.712.188	90,87
1.5. 2.1. 1.5. 1	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	159.252.000	144.712.188	90,87
1.5. 2.2. 1	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.020.944.800	912.822.104	89,41

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.5. 2.2. 1.1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.020.944.800	912.822.104	89,41
1.5. 2.2. 1.1. 1	Penyusunan Standar Harga	10.574.000	10.151.335	96,00
1.5. 2.2. 1.1. 2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	7.460.000	6.905.900	92,57
1.5. 2.2. 1.1. 3	Pengamanan Barang Milik Daerah	287.069.200	249.588.500	86,94
1.5. 2.2. 1.1. 4	Penilaian Barang Milik Daerah	93.110.000	92.182.100	99,00
1.5. 2.2. 1.1. 5	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	67.070.000	63.151.084	94,16
1.5. 2.2. 1.1. 6	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	54.900.000	52.543.510	95,71
1.5. 2.2. 1.1. 7	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	500.761.600	438.299.675	87,53

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.5. 2.3. 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.611.379.95 1	11.254.908.238	89,24
1.5. 2.3. 1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	141.079.010	121.594.235	86,19
1.5. 2.3. 1.1. 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	66.585.000	53.122.900	79,78
1.5. 2.3. 1.1. 2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	74.494.010	68.471.335	91,92
1.5. 2.3. 1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.426.525.521	7.557.216.121	89,68
1.5. 2.3. 1.2. 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.181.125.521	7.371.456.121	90,10
1.5. 2.3. 1.2. 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	245.400.000	185.760.000	75,70
1.5. 2.3. 1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	99.741.000	92.046.622	92,29
1.5. 2.3.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	8.700.000	8.669.100	99,64

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.5. 1	Kelengkapannya			
1.5. 2.3. 1.5. 2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	91.041.000	83.377.522	91,58
1.5. 2.3. 1.6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	781.147.300	691.559.496	88,53
1.5. 2.3. 1.6. 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.083.000	10.546.340	87,28
1.5. 2.3. 1.6. 2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	38.332.700	38.135.160	99,48
1.5. 2.3. 1.6. 3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.760.000	8.191.500	55,50
1.5. 2.3. 1.6. 4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	715.971.600	634.686.496	88,65
1.5. 2.3. 1.7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	497.560.000	483.247.000	97,12
1.5. 2.3. 1.7. 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	497.560.000	483.247.000	97,12
1.5.	Penyediaan Jasa	2.469.477.120	2.227.226.751	90,19

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.3. 1.8	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1.5. 2.3. 1.8. 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	852.802.000	773.969.049	90,76
1.5. 2.3. 1.8. 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	195.960.000	156.251.582	79,74
1.5. 2.3. 1.8. 3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.420.715.120	1.297.006.120	91,29
1.5. 2.3. 1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	195.850.000	82.018.013	41,88
1.5. 2.3. 1.9. 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	53.350.000	39.334.898	73,73
1.5. 2.3. 1.9. 2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	69.730.000	9.932.015	14,24
1.5. 2.3. 1.9. 3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	72.770.000	32.751.100	45,01

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.5. 2.4. 1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.419.287.000	2.913.078.486	85,20
1.5. 2.4. 1.1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.419.287.000	2.913.078.486	85,20
1.5. 2.4. 1.1. 1	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	232.688.000	226.617.067	97,39
1.5. 2.4. 1.1. 2	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	233.955.000	233.646.300	99,87
1.5. 2.4. 1.1. 3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	67.924.000	50.572.400	74,45
1.5. 2.4. 1.1. 4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	177.640.000	159.266.119	89,66
1.5. 2.4. 1.1. 5	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.071.310.000	1.619.027.047	78,16
1.5. 2.4. 1.1. 6	Penetapan Wajib Pajak Daerah	60.240.000	56.368.000	93,57

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Tahun 2024. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH memiliki 4 (empat) sasaran strategis dengan semua sasaran strategis tercapai
2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH adalah sebagai berikut :
 - a. Kurangnya Komitmen Antara Eksekutif dan Legislatif dalam percepatan penyusunan APBD
 - b. SDM Pengelola Keuangan pada PD Belum Maksimal dalam Memahami Aturan Pencairan Dana (Contoh dalam Pengelolaan Data Gaji)
 - c. Keterlambatan dalam Pengiriman Laporan Realisasi Penggunaan Dana ke Pusat

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.5. 2.4. 1.1. 7	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	10.160.000	10.140.000	99,80
1.5. 2.4. 1.1. 8	Penagihan Pajak Daerah	511.210.000	504.054.329	98,60
1.5. 2.4. 1.1. 9	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	54.160.000	53.387.224	98,57

Sumber : SIPD Penatausahaan

Badan Pengelola Keuangan Daerah mengampu 4 (empat) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 67 (enam puluh tujuh) sub kegiatan dengan pagu belanja sebesar Rp 219.435.489.568,80. Pada Tahun 2024 realisasi belanja Badan Pengelola Keuangan Daerah sebesar 212.914.022.357* atau sebesar 97.03%*, dimana pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah mencapai 97.75%*, Program Pengelolaan BMD 89.41%*, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mencapai 89.24%* dan Program Pengelolaan Pendapatan mencapai 85.20%*.

- d. Anggaran Kas tidak proposional dan tidak Sesuai dengan Rencana Kegiatan
- e. Masih Kurangnya Sosialisasi tentang Azas Penatausahaan Keuangan
- f. Managemen Kas Kurang Maksimal
- g. Belum Mempedomani Ketentuan Perundang-undangan terbaru
- h. Adanya Temuan yang Tidak Ditindaklanjuti
- i. Belum Terintegrasinya Proses Perencanaan dan Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan
- j. Tingkat Kepatuhan PD dalam Menyampaikan Laporan Aset Kurang
- k. Pengamanan dan Pemeliharaan BMD Kurang Optimal oleh PD Sebagai Pengguna Barang
- l. Belum Optimalnya Pelaksanaan Program dan Kegiatan Berorientasi Pelayanan yang Berbasis Kinerja
- m. Banyak Objek Pajak yang Belum Terdata
- n. Belum maksimalnya pemungutan PAD

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH adalah sebagai berikut:

- 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan secara terperinci
- 2. Perlunya Peningkatan Pembinaan SDM Terkait Penatausahaan Keuangan
- 3. Perlu adanya komitmen Kepala PD dengan Kepala Daerah, Perlunya Pembinaan dan Peningkatan SDM terkait Penyusunan Laporan Keuangan
- 4. Percepatan Pemenuhan Kelengkapan Dokumen Penyusunan LKPD oleh seluruh SKPD
- 5. Meningkatkan Kualitas Rekon Aset dan Melaksanakan Bimtek
- 6. Inventarisasi BMD berkala

7. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah serta Peningkatan Database Pajak Secara Online
8. Meningkatkan Agreement terkait Optimalisasi Kinerja secara Akuntabel
9. Penyesuaian dengan Perpres dan regulasi terkait

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun .

Parit Malintang, 14 Januari 2025
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH



TASLIM LETER, SE, Ak
NIP. 19740715 200212 1 011

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TASLIM LETER, SE.Ak
Jabatan : KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUHATRI BUR
Jabatan : BUPATI PADANG PARIAMAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dari kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parit Malintang, 02 Januari 2024

Pihak Kedua,


SUHATRI BUR

Pihak Pertama


TASLIM LETER, SE.Ak
NIP. 19740715 200212 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Jabatan : Kepala Badan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Laporan Keuangan Daerah	0
2	Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah Temuan BPK yang Material Terhadap Pengelolaan BMD	0
3	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Skor Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	A
4	Meningkatkan Pengelolaan PAD	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	6,5

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 197,811,800,000.00	APBD
2. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 960,944,800.00	APBD
3. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 14,364,538,143.00	APBD
4. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 3,473,287,000.00	APBD
JUMLAH	Rp 216,610,569,943.00	

Parit Malintang, 02 Januari 2024

Bupati Padang Pariaman,


SUHATRI BUR

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Padang Pariaman,


TASLIM LETER, SE.Ak
NIP. 19740715 200212 1 011

Lampiran 2 LHE SAKIP TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

INSPEKTORAT

Parik Malintang Kecamatan Anam Lingsung Kode Pos 25584

Pos El. inspektoral@padangpariamankab.go.id

Nomor : 61 /LHE/INSP/2024

Parit Malintang, 17 Mei 2024

Lampiran : -

Hal : Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

Kepada :
Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
di
Tempat

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Pedoman Evaluasi Internal Kabupaten Padang Pariaman No. 43 tahun 2023.

Evaluasi Implementasi SAKIP dapat memberikan simpulan hasil penilaian tahun sebelumnya dan implementasi SAKIP saat evaluasi berjalan, dengan kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebagai fakta obyektif instansi pemerintah/unit kerja mengimplementasikan SAKIP.

Nilai hasil penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100, dengan kategori sebagai berikut :

NO	KATEGORI	NILAI ANGKA	KETERANGAN
1.	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80 – 90	Memuaskan
3.	BB	>70 – 80	Sangat Baik
4.	B	>60 – 70	Baik
5.	CC	>50 – 60	Cukup
6.	C	>30 – 50	Kurang
7.	D	0-30	Sangat Kurang

Berdasarkan hasil evaluasi kami, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 memperoleh nilai sebesar 80.40 dengan kategori A dan interpretasi nilai Memuaskan, dengan rincian sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	TAHUN 2023		TAHUN 2024	
		BOBOT	NILAI	BOBOT	NILAI
1.	PERENCANAAN KINERJA	30	25.50	30	25.50
2.	PENGUKURAN KINERJA	25	23.10	30	23.10
3.	PELAPORAN KINERJA	15	12.00	15	12.30
4.	EVALUASI INTERNAL	10	19.50	25	19.50
JUMLAH		100	80.10	100	80.40
NILAI AKUNTABILITAS KINERJA			80.10		80.40
PREDIKAT			A (MEMUASKAN)		A (MEMUASKAN)

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditindaklanjuti sesuai rekomendasi. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

INSPEKTUR,

HENDRA ASWARA, S.STP, MM, CGCAE
Pembina Tk.I, NIP. 1981 1226 199901 1 001

Tembusan :
1. Bupati Padang Pariaman
2. Arsip

Lampiran 3 Tanggapan/ Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2023 dan 2024

MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP BPKD Tahun 2023

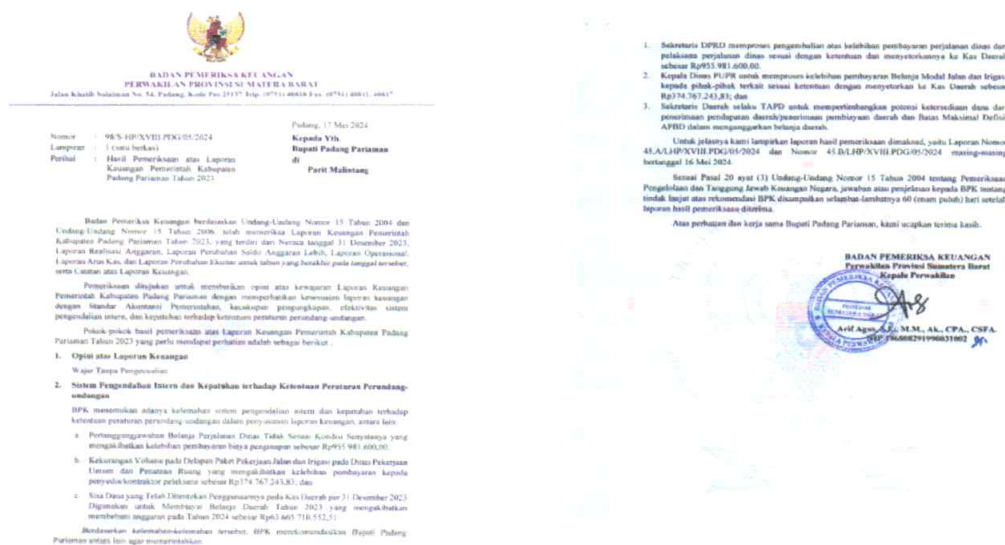
NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/PROGRES PENYELESAIAN
1	Membuat pedoman internal yang lebih teknis dari peraturan terkait penyusunan dokumen perencanaan yang berlaku (Permendagri 86 tahun 2017) diformalkan dalam bentuk Perbup/Peraturan Kepala Bappelitbangda/Legal Formal)	Sudah ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Nomor 31/KEP/BPKD/2022 tentang Pedoman Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman	1 Perangkat Daerah	Januari 2022	BPKD	100%
2	Membuat perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting)	Dalam pelaksanaan kegiatan semua bidang di lingkungan BPKD saling berkaitan guna pencapaian target dan kinerja baik secara fisik maupun keuangan - Koordinasi Pengelolaan Dana Desa dengan DPMD - Pemungutan Retribusi dengan OPD Pengumpul Retribusi - Pemeliharaan server e-BPHB dan e-FEB dengan Diskominfo - Koordinasi Penyusunan anggaran dengan seluruh SKPD - Koordinasi Pengelolaan BMD dengan seluruh SKPD - Koordinasi Penyusunan LKPD dengan seluruh SKPD	43 Perangkat Daerah	Januari-Desember 2024	BPKD	100%
3	Membuat semua unit/satuan kerja dan pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan	Menindaklanjuti dengan membuat surat pernyataan komitmen dengan seluruh unit kerja di lingkungan BPKD	1 Perangkat Daerah	Juni 2024	BPKD	Dalam Proses
5	Melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja setiap level organisasi unit dibawahnya secara berjenjang	Melakukan evaluasi internal berjenjang mulai dari Eselon III pada Kasubid/Kaubbag, Pungawal dan Staf. Kemudian dilanjutkan evaluasi internal oleh Kepala Badan	1 Perangkat Daerah	Januari-Desember 2024	BPKD	100%
6	Menerapkan pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional	Menerapkan sistem reward dan punishment dalam pengukuran kinerja dengan didasari oleh Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah tentang Pedoman Teknis Pengukuran Kinerja	1 Perangkat Daerah	Juni 2024	BPKD	Dalam Proses
7	Membuat komitmen semua unit/satuan kerja dan pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	Melakukan pengawasan atas komitmen yang telah ditetapkan	1 Perangkat Daerah	Januari 2024	BPKD	100%
8	Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada seluruh unit kerja/perangkat daerah dan berjenjang	Optimalisasi evaluasi internal berjenjang	1 Perangkat Daerah	Januari-Desember 2024	BPKD	100%
9	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Sesuai dengan rekomendasi tim evaluator	1 Perangkat Daerah	Januari-Desember 2024	BPKD	100%
10	Perlu merancang aplikasi berbasis IT untuk mengumpulkan data kinerja	Pengumpulan data kinerja di implementasikan melalui aplikasi Sistem Informasi Data dan Akuntabilitas Kinerja Padang Pariaman (SIDAK PAPA)	1 Perangkat Daerah	Januari-Maret 2024	BPKD	100%
11	Perlu merancang aplikasi berbasis IT dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sudah diimplementasikan melalui aplikasi Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja (SIMAK KINERJA)	1 Perangkat Daerah	Januari-Maret 2024	BPKD	100%
12	Lebih mengoptimalkan hasil dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mencapai efektifitas efisiensi kinerja	Merencanakan pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal di lingkungan BPKD	1 Perangkat Daerah	Januari-Desember 2024	BPKD	100%
13	Merangsang kualitas perencanaan kinerja melalui pengembangan sistem perencanaan yang berbasis aplikasi teknologi informasi (e-planning) terintegrasi	Merencanakan pelaksanaan perencanaan kinerja melalui aplikasi SIMDA FMIS	1 Perangkat Daerah	Januari-Desember 2023	BPKD	100%

MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP BPKD Tahun 2024

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/PROGRES PENYELESAIAN
1	Menyempurnakan perencanaan kinerja sehingga dapat dimanfaatkan dalam mewujudkan hasil yang berkesinambungan yaitu : a. Aktivitas yang dilaksanakan harus mendukung kinerja yang ingin dicapai yaitu Rencana Aksi tahun 2023 dan tahun 2024 b. Setiap pegawai harus memahami, peduli dan berkomitmen terhadap kinerja yang telah direncanakan dalam rangka pencapaian kinerja	1. Untuk rencana aksi 2024 sudah disusun sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mempedomani sub kegiatan pada masing masing bidang 2. Akan menyusun komitmen bersama dengan semua ASN dalam pencapaian kinerja	2 Dokumen	Jan s/d Des 2024 Januari 2025	Kepala BPKD	Dalam proses
2	Melengkapi pemenuhan dokumen pengukuran yaitu : a. Menyusun SOP Pengukuran Kinerja BPKD b. Menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja yang mencakup mekanisme dan pengumpulan data kinerja yang handal	1. Sudah dilakukan penyusunan SOP Pengukuran Kinerja sesuai LHE Inspektorat 2. Sudah dilakukan penyusunan SOP Pengumpulan Data Kinerja	2 Dokumen	Juli 2024	Sekretariat BPKD (Perencanaan)	Dalam proses
3	Memfaatkan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam pemberian reward dan punishment serta penyusunan strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	1. Dalam pencapaian kinerja sudah mempedomani pengukuran kinerja yang ada 2. Untuk pemberian reward dan punishment akan dipelajari dan disusun terlebih dahulu indikator pengukurannya	1 Kegiatan	Jan s/d Des 2024 Januari 2025	Kepala BPKD	Dalam Proses
5	Menggunakan informasi Laporan Kinerja BPKD dalam penyusunan strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	Akan mengoptimalkan penggunaan laporan kinerja BPKD dalam melaksanakan kegiatan dan kebijakan dalam pencapaian kinerja yang lebih baik	1 Dokumen	Juli-Desember 2024	Seluruh Bidang pada BPKD	Dalam proses
6	Melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara rutin dan berjenjang	Akan lebih mengoptimalkan evaluasi internal secara berjenjang pada masing-masing bidang	1 Dokumen	Juli s.d Desember 2024	Kepala BPKD	Dalam Proses
7	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara berkualitas dengan pendalaman dan Sumber Daya yang memadai	Akan mengoptimalkan evaluasi kinerja dalam peningkatan kapasitas SDM guna pencapaian kinerja yang lebih baik	1 Kegiatan	Juli s.d Desember 2024	Kepala BPKD	Dalam proses

Lampiran 4 Prestasi Perangkat Daerah Tahun 2024

1. Opini WTP atas LKPD Tahun 2023



2. Peringkat Kedua Pemerintah Daerah dengan Kinerja Pengelolaan Dana Desa terbaik dari KPPN Padang



3. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Terbaik VI dalam Ketepatan Penysetoran Iuran Wajib Pegawai (IWP 8%), Iuran Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Iuran program Jaminan Kematian (JKM) Tahun 2024 dari PT. Taspen



4. Perangkat Daerah Predikat A Pada Penilaian SAKIP Tahun 2024



Kepada :
Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Padang Pariaman

di

Tempat

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Pedoman Evaluasi Internal Kabupaten Padang Pariaman No. 43 tahun 2023.

Evaluasi Implementasi SAKIP dapat memberikan simpulan hasil penilaian tahun sebelumnya dan implementasi SAKIP saat evaluasi berjalan, dengan kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebagai fakta obyektif instansi pemerintah/unit kerja mengimplementasikan SAKIP.

Nilai hasil penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100, dengan kategori sebagai berikut :

NO	KATEGORI	NILAI ANGKA	KETERANGAN
1	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 – 90	Memuaskan
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik
4	B	>60 – 70	Baik
5	CC	>50 – 60	Cukup
6	C	>30 – 50	Kurang
7	D	0-30	Sangat Kurang

Berdasarkan hasil evaluasi kami, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 memperoleh nilai sebesar 80,40 dengan kategori A dan interpretasi nilai **Memuaskan**, dengan rincian sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	TAHUN 2023		TAHUN 2024	
		BOBOT	NILAI	BOBOT	NILAI
1.	PERENCANAAN KINERJA	30	25,50	30	25,50
2.	PENGUKURAN KINERJA	25	23,10	30	23,10
3.	PELAPORAN KINERJA	15	12,00	15	12,30
4.	EVALUASI INTERNAL	10	19,50	25	19,50
JUMLAH		100	80,10	100	80,40
NILAI AKUNTABILITAS KINERJA			80,10		80,40
PREDIKAT			A		A
			(MEMUASKAN)		(MEMUASKAN)

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditindaklanjuti sesuai rekomendasi. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

INSPEKTUR,

[Signature]

HENDRA ASWARA, S.STP, MM, CGCAE
Pembina Tk.I, NIP. 19811226 199901 1 001

Tembusan :

1. Bupati Padang Pariaman
2. Arsip.

Lampiran 5 Dokumentasi Kegiatan Tahun 2024

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN

MUSRENBANG KECAMATAN



RAPAT INTERNAL PENATAUSAHAAN SIPD



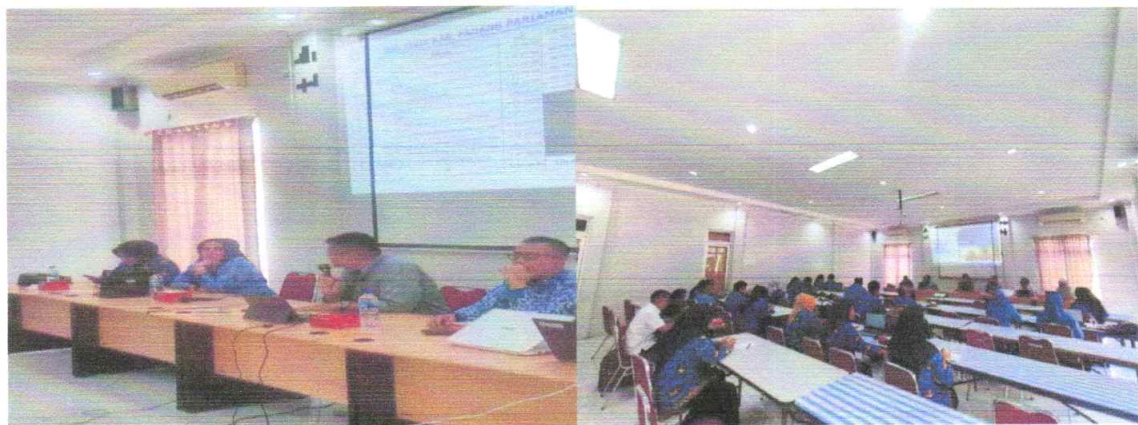
COACHING CLINIC PENGINTUPAN SIPD RI PENERIMAAN



REKONSILIASI BOS



ACARA DAK FISIK 2024



SIMULASI REKON BELANJA DI SIPD RI



KOORDINASI TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN BPK RI



VISITASI PENGELOLAAN KEUANGAN PROVINSI



PROGRAM PENGELOLAAN BMD

**KOORDINASI PENYELESAIAN ASET PADA KANTOR BANDAR UDARA WILAYAH VI DENGAN
KAJARI PARIAMAN**



REKONSILIASI BELANJA MODAL SERTA PENGINPUTAN KE SIMDA BMD 2024



REKON BMD



REKON BOS



PENGHAPUSAN BMD



PENJEMPUTAN STNK KENDARAAN DINAS



PENGECEKAN BMD



RAKOR BARANG MILIK DAERAH



PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA

ACARA PENINGKATAN KAPASITAS SDM DI LINGKUNGAN BPKD



RAPAT TERKAIT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI BPKD

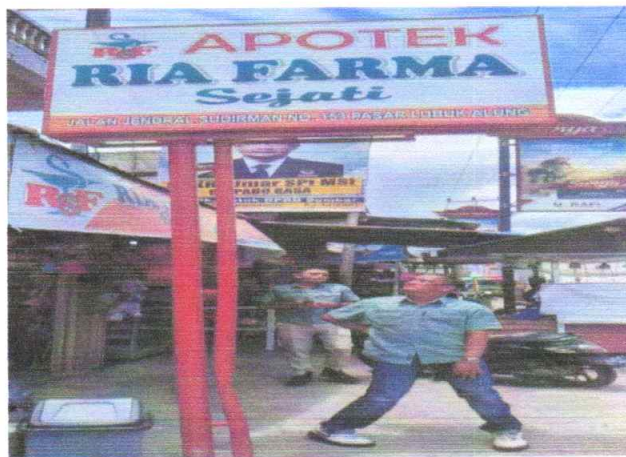


PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

SOSIALISASI SPPT PBB P2 KE NAGARI



PENDATAAN PAJAK REKLAME



PENDATAAN ULANG PAJAK RESTORAN DI BIM



OPTIMALISASI PAD DI ISTANA SEAFOOD OLEH BIDANG PENDATAAN DAN PENAGIHAN



PENYULUHAN PENTINGNYA PENERIMAAN PBB

